

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengalami peningkatan populasi yang signifikan setiap tahun. Menurut Data Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk negara Indonesia telah mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023, sehingga dari peningkatan yang dialami oleh negara Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan yang pesat. Pada pertengahan 2023, populasi negara Indonesia mengalami kenaikan sekitar 1,05% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai total 275,77 juta jiwa pada pertengahan 2022. (Annur C, 2023). Perkembangan penduduk di negara Indonesia selain mengalami percepatan juga di ikuti dengan tingginya jumlah angkatan kerja. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk negara Indonesia mampu menjadikan permasalahan tersendiri bagi kehidupan masyarakat, serta tidak lupa menjadi permasalahan utama bagi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia didalam negeri dengan disertai oleh tingginya angka pengangguran setiap tahunnya(Sitamala, 2023).

Peningkatan jumlah penduduk di negara Indonesia tidak hanya berdampak pada populasi pertambahan penduduk, akan tetapi juga berpengaruh dengan munculnya masalah pengangguran. Masalah pengangguran sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk dan peluang kerja. Jika kedua masalah

ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak buruk pada keberlanjutan negara, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah : (1) penduduk atau warga negara yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk atau warga negara yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, (3) penduduk atau warga negara yang tidak mencapai pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (bps.go.id, 2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari tahun 2023 melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta dan berkurang sekitar 410 ribu orang dibandingkan dengan jumlah pengangguran di bulan Februari 2022 (Ahdiat, 2023). Sehingga dari data tersebut memiliki pengaruh bahwa, pertumbuhan ekonomi tahunan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran. Namun berdasarkan jumlah data pengurangan angka pengangguran di Indonesia, juga diperlukan persiapan matang untuk beradaptasi dengan dinamika pertumbuhan penduduk kedepannya yang berdampak pada jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan dengan disertai dengan persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Persaingan dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim di negara Indonesia selain menjadi permasalahan utama juga terdapat permasalahan lain yang muncul didalam pertumbuhan penduduk. Permasalahan pertumbuhan penduduk yang

muncul lainnya diantaranya persaingan dalam pemerolehan kerja terhadap kecakapan dan kompetensi yang dimiliki setiap Sumber Daya-nya.

Melihat kondisi lapangan kerja di Indonesia yang mengalami *Talent Shortage* atau kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah lowongan dengan jumlah pelamar kerja (medcom.id, 2022). Maka dari itu, masyarakat Indonesia semakin termotivasi untuk mencari peluang kerja di luar negeri demi mencapai keberuntungan yang lebih besar dengan peluang yang lebih menarik. Sehingga dengan motivasi tersebut, tidak sedikit warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan segi pendapatannya, upah yang diberikan oleh luar negeri jauh berbeda dengan yang diberikan di dalam negeri. Sehingga dari faktor tersebut membuktikan bahwa dengan bekerja di luar negeri lebih memberikan upah yang lebih menjanjikan daripada harus bekerja di dalam negeri dengan kualifikasi penyaringan kerja yang terkesan rumit (Mindarti & Nabil, 2019).

Tidak sedikit dari penduduk negara Indonesia percaya bahwa bekerja di luar negeri dapat membantu stabilitas kehidupan baik secara ekonomi dan sosial. Selain itu dorongan dari keluarga juga menjadi faktor penting didalam mengambil keputusan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Rekomendasi dari orang tua atau tetangga yang terdahulunya menjadi mantan Pekerja Migran Indonesia juga sering menjadi alasan untuk memilih bekerja di luar negeri, dengan harapan dapat memperbaiki dan mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan gaji yang lebih menjanjikan di masa depan.

Serta alasan kuat akan tingginya jumlah tenaga migran kembali untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia diakibatkan oleh gaya hidup yang konsumtif dan minimnya pelatihan dan pemberdayaan usaha produktif sebagai metode perluasan penciptaan lapangan kerja.

Kontribusi pengiriman pekerja migran atau buruh migran menjadi salah satu bentuk penopang tumbuhnya perekonomian nasional serta memiliki kontribusi secara nyata terhadap pendapatan negara serta produktivitas perekonomian. Kontribusi ini diperoleh melalui tingginya jumlah remintasi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Selain itu remintasi yang diberikan tidak hanya memberikan dampak secara finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, akan tetapi manfaat tersebut juga berperan sebagai katalistator dalam meningkatkan devisa negara. Menurut Badan Pusat Statistik Remintasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu transfer dari Pekerja Migran Indonesia yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di Indonesia. Tercatat bahwa sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* rata-rata remitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai USD 9.8 miliar per tahun (ekon.go.id, 2022).

Melalui kontribusi tersebut, pemerintah harus lebih berupaya untuk meningkatkan pelayanan perlindungan dan keberpihakan kepada para Pekerja Migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan. Sehingga melalui manfaat remintasi yang diberikan melalui pengiriman Pekerja Migran Indonesia terdapat sebuah kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam optimalisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui skema (G to G)

atau *Government to government*, serta menjamin keamanan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan imigran (ekon.go.id, 2022).

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Tahun 2017-2022

Nomor	Data Tahun	Total Tenaga Kerja Asing di Indonesia atau Pekerja
1.	2017	85. 974
2.	2018	95. 335
3.	2019	109. 546
4.	2020	93. 761
5.	2021	88. 271
6.	2022	96. 574

Sumber data : (Kusnandar Viva Budy, 2022) databoks

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengirim Tenaga Kerja Migran tertinggi di dunia dimana hal tersebut dapat dilihat dari data yang disajikan di atas yaitu pada tabel 1.1, dimana setiap tahunnya terdapat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dari kegiatan tersebut pemerintah memiliki strategi untuk mengatur penempatan serta memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak permasalahan. Bentuk permasalahan dalam perlindungan tersebut diantaranya banyak kasus pekerja migran mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, terutama para pekerja yang kurang terampil (*low-skilled*) dan tidak berdokumen (*undocumented*). Berdasarkan permasalahan yang muncul dari pengiriman

tenaga kerja migran di Indonesia, pemerintah mencanangkan sebuah program yang bertujuan untuk membantu mantan pekerja migran untuk tidak berfikir kembali merantau ke luar negeri yakni melalui program pemberdayaan.

Menurut (Mardikanto & Soebianto, 2019) Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang diartikan sebagai :

“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”.

Merujuk dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan mempersiapkan kelompok sasaran untuk dapat mencapai perubahan sosial yang lebih baik dan mandiri. Tujuan dari pemberdayaan tersebut ialah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan produktif.

Mengacu pada penelitian terdahulu tentang Pemberdayaan Mantan PMI Melalui Program Desmigratif di Kabupaten Malang (Studi di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang) membahas akan bentuk pelaksanaan program desmigratif disertai dengan hambatan dan kendala dari pelaksanaan program desa migran produktif di Desa Arjowilangun, serta didalam penelitian ini terfokus kepada pemberdayaan masyarakat melalui 4 pilar yang ada pada program Desmigratif (Nabila, 2019).

Melalui pelaksanaan program desa migran produktif sebagai upaya pengurangan pekerja migran Indonesia nonprosedural menganalisis tentang pelaksanaan program desmigratif dengan disertai tujuan untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan upaya mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia non prosedural serta didalam penelitian ini juga membahas akan upaya yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam mengurangi kendala pelaksanaan Desmigratif (Putri & Nugroho, 2020).

Mengenai pola asuh anak keluarga Tenaga kerja Wanita (TKW) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang membahas akan dampak pola pengasuhan anak terhadap ketidak ikut sertaannya seorang ibu ditengah pengasuhan anak. Sehingga dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat dimaknai bahwa didalam penelitian yang telah dilakukan merujuk kepada praktek dari pelaksanaan program desmigratif disertai dengan hambatan dari pelaksanaan program. Selain itu dari pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri berdampak terhadap pola asuh anak (Wahyuningsih & Jatningsih, 2019).

Terdapat sebuah motivasi pengiriman tenaga kerja migran Indonesia keluar negeri selain dilatar belakang oleh kurangnya ketersediaan lapangan kerja, juga dilatarbelakangi oleh keinginan akan memenuhi kebutuhan yang ada didalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Keinginan mantan tenaga kerja migran untuk kembali bekerja ke luar negeri juga dipengaruhi oleh tatanan kehidupan yang tidak sedikit penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dari tatanan tersebut mengakibatkan

munculnya motivasi untuk menjadi buruh migran ketimbang menjadi buruh petani dengan penghasilan yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya. Selain itu faktor kepemilikan lahan juga memiliki pengaruh penting terhadap status perekonomian penduduknya, sehingga bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian luas maka memiliki peluang besar untuk mendapat penghasilan yang lebih besar, namun sebaliknya apabila warga dengan kepemilikan lahan sempit akan memilih untuk bekerja dengan orang lain yang memiliki lahan pertanian yang luas.

Sebagai respon terhadap isu yang muncul yaitu didalam pengiriman tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk program Desa Migran Produktif untuk memberdayakan komunitas pekerja migran Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 program Desmigratif dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas pekerja migran di desa migran produktif menjadi penting. Sehingga Program Desmigratif dilaksanakan dengan tujuan : (1) untuk melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja, baik didalam dan luar negeri, yang dimulai dari desa asal Pekerja Migran Indonesia, (2) Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, (3) Mendorong peran aktif Pemerintah Desa Wilayah asal Pekerja Migran Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, (4) mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural (Kominfo, 2019).

Program Desmigratif yang diluncurkan pada tahun 2016 melibatkan desa-desa dengan penduduk yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia. Untuk merealisasikan program ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mencanangkan program tersebut di dua desa sebagai *pilot Project*. Proyek percontohan program Desmigratif sendiri dilakukan di dua lokasi yakni Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dan Desa Kuripan, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Jawa tengah. Pada tahun 2017 program Desmigratif dikembangkan di 120 desa, sementara pada tahun 2018 terdapat 130 Desmigratif, dan pada tahun 2019 terdapat 150 Desmigratif. Program Desmigratif setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagai desa binaan yang bertujuan untuk memberdayakan PMI, Mantan PMI maupun keluarga PMI. Selain itu program ini dirancang sebagai solusi dan bentuk kepedulian negara untuk melindungi pekerja migran Indonesia, serta sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan layanan perlindungan yang terkoordinasi dan terintegrasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga.

Tabel 1. 2 Provinsi Asal Pekerja Migran Terbanyak Tahun 2021

No	Asal Daerah	Total
1.	Provinsi Jawa Timur	28.810
2.	Provinsi Jawa Tengah	17.504
3.	Provinsi Jawa Barat	12.178
4.	Bali	5.086
5.	Lampung	4.244
6.	Nusa Tenggara Barat	2.331

7.	Banten	400
8.	DKI Jakarta	285
9.	Nusa Tenggara Timur	241
10.	Sulawesi Utara	241

Sumber : (Dihni Vika Azkiya, 2022) databoks

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengirim pekerja migran terbanyak dan menduduki sebagai peringkat satu di Indonesia yakni dengan total 28.810 buruh migran. Sehingga dengan data tersebut dapat diketahui bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan penyumbang tenaga migran dan devisa tertinggi di Indonesia.

Sementara itu untuk data Kabupaten dengan penyumbang migran tertinggi di Jawa Timur ditempati oleh Kabupaten Malang dengan menduduki peringkat ke 3 setelah Blitar. Sehingga dengan menduduki peringkat tertinggi ke tiga di Jawa Timur, daerah Kabupaten Malang dengan jumlah 33 kecamatan masing-masing kecamatan yang paling besar dan yang paling banyak mengirim Pekerja Migran Indonesia adalah Kecamatan Sumbermanjing dengan total 1,116 dan disusul dengan Kecamatan Kalipare dengan jumlah 880. Data tersebut adalah rekap data Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Malang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang telah di olah oleh penulis dengan cara melakukan perankingan atas kecamatan dengan jumlah pengirim tenaga kerja Indonesia terbanyak. Adapun yang menjadi negara tujuan yang paling diminati oleh pekerja migran yakni Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab

Saudi, Brunei Darussalam, Korea Selatan. Oleh karena itu untuk data yang lebih lengkap dapat dilihat ditabel bawah ini.

Tabel 1. 3 Data Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Malang pada Tahun 2016-2020 Berdasarkan Lokasi Penempatan di Negara Lain

No	Kecamatan	Negara Tujuan	Jumlah
1	Kecamatan Sumbermanjing	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	1,116
2	Kecamatan Kalipare	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	880
3	Kecamatan Dampit	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	778
4	Kecamatan Bantur	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan , macau	719
5	Kecamatan Pagelaran	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	692
6	Kecamatan Sumberpucung	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan , Qatar	689

7	Kecamatan Donomulyo	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	687
8	Kecamatan Gedangan	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	640
9	Kecamatan Turen	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	550
10	Kecamatan Kepanjen	Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalamm, Korea Selatan	494

Sumber : Diolah oleh penulis (malangkab. bps, 2021)

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat diartikan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2016 – 2020 daerah kabupaten malang terhitung sebagai kabupaten yang banyak mengirim pekerja migran ke luar negeri. Salah satu dari daerah Kabupaten Malang yang terkenal sebagai lumbung migran atau pengirim pekerja migran terbanyak yakni di daerah Kalipare yang bertepatan di daerah Kecamatan Kalipare Desa Arjowilangun. Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Kalipare terdapat salah satu desa yang terkenal sebagai pengirim tenaga kerja Indonesia yakni adalah Desa Arjowilangun, dimana Desa ini dikenal sebagai pahlawan devisa negeri yang terkenal sebagai desa basis TKI di Kabupaten Malang dengan julukan sebagai lumbung migran. pengiriman

pekerja migran di Desa Arjowilangun bukanlah sebuah hal yang tanpa direncanakan. Akan tetapi profesi sebagai tenaga kerja migran merupakan salah satu profesi yang cukup diminati oleh penduduk daerah Arjowilangun dengan alasan yang cukup menjanjikan dalam segi ekonomi.

Desa Arjowilangun merupakan salah satu dari beberapa desa yang tergolong tercukupi dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang terbilang terpenuhi. Akan tetapi perekonomian dari warga Desa Arjowilangun sendiri juga berpangkal dari kegiatan pertanian. Oleh karena itu, penghasilan dengan berprofesi sebagai petani belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena pada dasarnya kepemilikan lahan sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian setiap penduduknya. Selain masalah ekonomi, Desa Arjowilangun juga tidak luput dari masalah pendidikan yang sebagian kecil dari penduduk Desa Arjowilangun belum sadar akan pentingnya mengenyam pendidikan. Oleh karena itu masalah kemiskinan sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi melainkan juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan setiap individu. Sehingga untuk data mantan PMI dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 4 Data Mantan PMI di Desa Arjowilangun Tahun 2018 (Jiwa)

Nomor	Jenis Kelamin Mantan Pekerja Migran Indonesia	Total
1	Pria	255 Orang
2	Wanita	499 Orang

Sumber : (Nabila, 2019)

Munculnya Program Desa migran produktif diharapkan mampu membantu pemerintah, khususnya ditingkat kabupaten dan desa didalam upaya menekan angka pengiriman Pekerja Migran Indonesia salah satunya yakni di Desa Arjowilangun. Dimana pilar dari fokus program Desmigratif sendiri diharapkan dapat membantu didalam meningkatkan pelayanan, memberdayakan serta diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sesuai dengan 4 pilar yang terkandung didalam Program Desa migran produktif dalam upaya pemberdayaan melalui program Desa migran produktif.

Desa Arjowilangun telah tergabung menjadi Desa Migran Produktif dan telah menjalankan program tersebut sejak tahun 2017, dimana dari program tersebut meliputi kegiatan yang terfokuskan pada pemupukan usaha produktif dengan metode pelatihan dan pendampingan kepada mantan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dimana pelatihan dan pendampingan yang diberikan disini yaitu di khususkan dengan pelatihan pembuatan olahan makanan ringan berupa olahan keripik dengan pemanfaatan sumber daya sekitar. Sehingga dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan mantan pekerja migran di Negara Indonesia melalui Program Desmigratif yang dilaksanakan di Desa Arjowilangun. Maka dari itu berdasarkan topik diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan melalui program Desa migran produktif (Evaluasi Program Desmigratif berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Arjowilangun,**

Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)” dimana penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi program Desmigratif khususnya didalam penumbuh kembangan usaha produktif yang telah dilaksanakan di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan hasil dan dampak yang muncul pasca program dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang terdapat didalam kajian penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi program Desmigratif berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan melalui program Desa Migran Produktif di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah didalam penelitian, maka adapun tujuan dari kajian penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program Desmigratif berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan melalui program Desa Migran Produktif di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dari kajian penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat secara Teoritik adalah untuk menambah khazanah ilmiah bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori dalam ilmu administrasi

publik khususnya yang berkenaan dengan evaluasi program Desmigratif Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan melalui program Desa Migran Produktif di Wilayah Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan baik bagi akademisi, pemangku kekuasaan, politisi, dan masyarakat terkait dengan evaluasi program Desmigratif Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan melalui program Desa Migran Produktif di Wilayah Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.
3. Manfaat Akademis yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan juga menjadi referensi untuk penelitian dan penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan evaluasi program Desmigratif Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan melalui program Desa Migran Produktif di Wilayah Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.